BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penghindaran Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:146) menyatakan bahwa:

"Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan".

Sedangkan menurut Pohan (2015:11) menyatakan bahwa:

"Penghindaran pajak adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak denan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penghindaran pajak adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pajak terutama perencanaan pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

2.1.1.2 Metode Penghindaran Pajak

Menurut Stiglitz (2001:7) mengemukakan bahwa:

> "Metode yang digunakan untuk menghindari pajak itu bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Sesungguhnya wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan".

2.1.1.3 Karakter Penghindaran Pajak

Menurut Erly (2016:8) mengemukakan bahwa Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

> "Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara utuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991)"
>
> .

2.1.1.4 Indikator Penghindaran Pajak

Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasi dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak yang dikemukakan oleh Toto Prihadi (2012) dan Nurfadillah (2016) yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu:

$$\textbf{CETR} = \frac{\textbf{Beban Pajak}}{\textbf{Laba Sebelum Pajak}} \times \textbf{100}\%$$

Semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yaitu *Cash* ETR (*Effective Tax Rate*). CETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak (Ajeng, 2016). CETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. CETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadilah, 2016).

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:304) menyatakan bahwa:

> "Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya".

Adapun pengertian profitabilitas yang dikemukakan oleh S. Munawir (2004:33) yaitu:

> "Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai akhir operasional perusahaan selama periode tertentu".

Sedangkan menurut Arief (2009:63) menyatakan bahwa:

> "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari hasil penjualan total aktiva maupun modal sendiri selama periode tertentu.

2.1.2.2 Indikator Profitabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009), ada beberapa jenis rasio profitabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Margin Laba (*Profit Margin*)

$$Profit\ Margin = \frac{Pendapatan\ Bersih}{Penjualan}$$

Angka ini menunjukan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

2. *Asset Turnover*

$$Asset\ Turnover = \frac{Penjualan\ Bersih}{Total\ Aktiva}$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

3. *Return on Equity*

$$Return\ on\ Equity = \frac{Laba\ Bersih}{Rata - rata\ Modal\ (Equity)}$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.

4. *Return on Total Asset*

$$Return\ on\ Total\ \ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Rata - rata\ Total\ Aset}$$

Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

5. *Basic Earning Power*

$$Basic\ Earning\ Power = \frac{Laba\ sebelum\ bunga\ \&\ pajak}{Total\ Aktiva}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

6. *Earning per Share*

$$Earning\ per\ Share = \frac{Laba\ Saham\ Bersangkutan}{Jumlah\ Saham}$$

Rasio ini menunjukan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba.

7. *Contributin Margin*

$$Contributin\ Margin\ = \frac{Laba\ Kotor}{Penjualan}$$

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat mengontrol pengeluaran untuk

biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba.

Muhammad Samsul (2006:145) dan Bambang Riyanto (2001:44) mengemukakan indikator yang sama seperti yang telah dipaparkan oleh Sofyan Syafri Harahap, diantaranya Margin Laba (*Profit Margin*), *Return On Equity* (ROE), *Return on Asset, Return on Investment.*

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu ROA (*Return on Assets*). ROA mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasional. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. ROA merupakan aset yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total aset setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar.

2.1.2.3 *Return On Asset*

Pengertian *Return on asset* (ROA) menurut Wibowo dan Abubakar (2009:143) yaitu:

"Perbandingan antara laba bersih dengan jumlah harta rata-rata, rasio tersebut merupakan ukuran tingkat profitabilitas ditinjau dari jumlah harta yang dimilikinya".

$$Return\ on\ Total\ \ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Rata - rata\ Total\ Aset} \times 100\%$$

Adapun pengertian ROA yang dikemukakan James O. Gill (2008:50) yaitu mengukur pendapatan (laba) yang dihasilkan dari penggunaan asset (aktiva) usaha. Nilai ROA rendah menggambarkan kinerja yang buruk atau penggunaan asset yang tidak efisien oleh manajemen. Sedangkan nilai ROA yang tinggi menggambarkan kinerja yang baik atau penggunaan asset yang efisien oleh manajemen.

2.1.3 Kepemilikan Keluarga

2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Keluarga

Menurut Nurlaila Zubir (2008:1) mengemukakan bahwa:

> "Bisnis keluarga adalah bisnis yang dimiliki keluarga dan dikelola bersama oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, ada tiga jenis bentuk perusahaan yang merupakan bisnis keluarga yaitu perusahaan kepemilikan pribadi, perusahaan firma dan perusahaan perseroan terbatas".

Sedangkan pengertian bisnis keluarga menurut Thomas W. Zimmerer (2008:31) menyatakan bahwa:

> "Bisnis keluarga *(family owned business)* adalah bisnis yang pengendalian keuangannya dilakukan oleh satu atau lebih anggota keluarga".

Pengertian kepemilikan keluarga menurut Kesit (2014:9) menyatakan bahwa:

> "Kepemilikan keluarga merupakan perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, berdasarkan keturunan atau warisan dari orang orang yang lebih dulu menjalankannya, atau keluarga yang mewariskan perusahaannya kepada generasi yang akan datang".

Adapun pengertian kepemilikan keluarga menurut Mooryati Soedibyo (2012:38) yaitu:

> "Kepemilikan keluarga yaitu kepemilikan saham perusahaan dengan satu orang atau lebih dari anggota keluarga yang berperan aktif dalam aktivitas perusahaan".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga adalah bentuk dari bisnis keluarga yang dijalankan oleh keluarga berdasarkan keturunan ataupun warisan yang bukan perusahaan publik, negara ataupun institusi keuangan.

2.1.3.2 Indikator Kepemilikan Keluarga

Menurut Arifin (2003) dan Wahyu (2015) menjelaskan bahwa Semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 50% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Kepemilikan perusahaan diukur dengan nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya (Fertika, 2014). Adapun indikator kepemilikan keluarga menurut Sri Rezeki (2015):

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah Saham pihak keluarga}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu indikator yang dikemukakan oleh Sri Rezeki untuk mengetahui berapa jumlah saham yang dimiliki keluarga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hamid (2012:25) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan gabungan dari keduanya.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan *(profit)* pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Sri Rezeki, 2015). Dalam penelitian Alfajri (2016) mengemukakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* namun dengan nilai koefisien negatif. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmi (2016) mengemukan hal yang sama yaitu Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Deddy, 2016). Sedangkan menurut Kesit (2014) ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2014) yang mengemukakan bahwa ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas

berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Maka diprediksi bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabillitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan aset perusahaan daripada harus membayar pajak (Munawir, 2004:33).

Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan selalu mentaati pembayaran pajak.

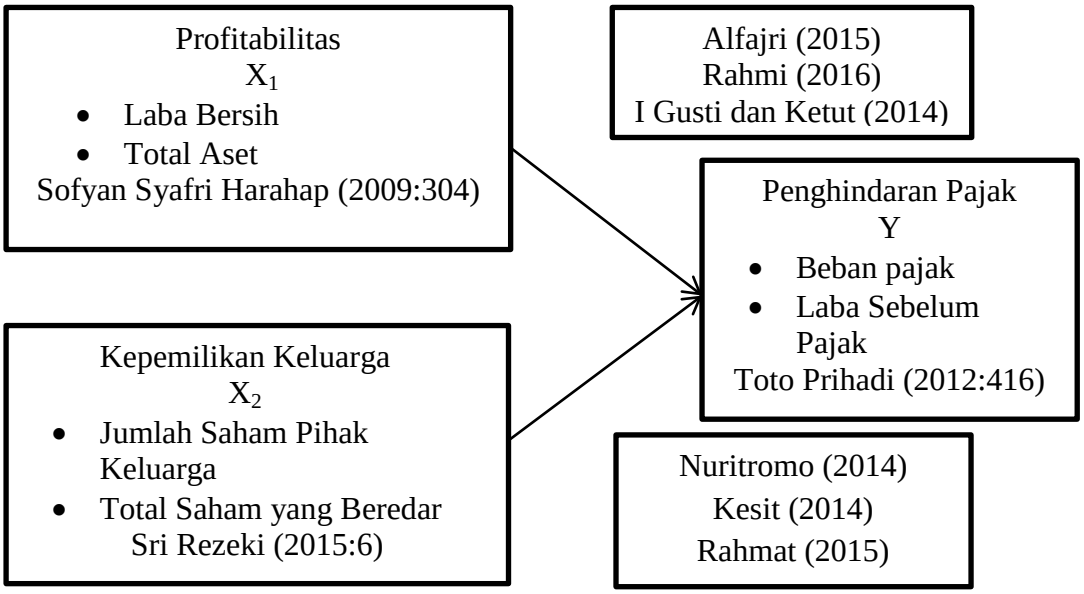
2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Nuritomo (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kesit (2014) yang mengemukakan bahwa kepemilikan keluarga merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak

manajer dalam perusahaan non-keluarga. *Family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak (Rahmat, 2015).

Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kelurga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin meningkatnya kepemilikan keluarga, maka penghindaran pajak akan menurun. Perusahaan keluarga rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan (Hamid, 2012:26). Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu

yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H2 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.